

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PENGUSAHA SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PERILAKU PROSOSIAL UNTUK PENGUATAN KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT DI KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR

Irmayani

ABSTRAK

Pengalaman industrialisasi di negara-negara maju telah banyak memberikan inspirasi bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Berbagai pengalaman yang dapat ditimba dari negara-negara maju adalah masalah keterkaitan industri atau dunia usaha pada pembangunan masyarakat di sekitarnya keharmonisan hubungan antara dunia usaha dan masyarakat sekitarnya akan menciptakan keseimbangan yang dipandang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak.

Dalam konteks Indonesia, dimana kerusakan lingkungan terus-menerus meluas di negeri ini, kemiskinan dan pengangguran terus bertambah. Kemelut tersebut menjadi tantangan bersama yang harus dijawab pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat. Potensi pelaku dunia bisnis atau pengusaha untuk menjalankan perubahan sosial melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial tidak dapat tercapai optimal jika aturan tidak ditegakkan, bahkan oleh penegak hukum. Kemitraan antara pemerintah, pengusaha dan komunitas hanya dapat berjalan jika ada kepercayaan dan sikap keterbukaan.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ada beberapa kecenderungan yang layak dicermati sebagai dampak dari pembangunan yang selama ini menjadi tumpuan dalam proses perubahan. *Pertama*, belum optimalnya pemerataan pembangunan di segala bidang. *Kedua*, masih terdapatnya kesenjangan sosial ekonomi antara golongan beruntung dan kuat dengan golongan yang kurang beruntung yang lemah. *Ketiga*, kecenderungan semakin meningkatnya permasalahan sosial dalam masyarakat. *Keempat*, pada sisi lain kemampuan pemerintah yang semakin terbatas terutama dalam penyelesaian masalah kesejahteraan sosial. *Kelima*, usaha kesejahteraan sosial dalam mengatasi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial yang selama ini dilakukan oleh beberapa pihak dipandang belum optimal. *Keenam*, tanggung jawab sosial dunia usaha atau pengusaha bagi penyelesaian permasalahan kesejahteraan sosial sebagai wujud nyata partisipasinya dipandang belum optimal menyentuh sasaran.

Berbagai kecenderungan yang disebutkan di atas merupakan cerminan dari berbagai fenomena yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan termasuk pembangunan kesejahteraan sosial. Dalam tataran makro sudah selayaknya pembangunan kesejahteraan sosial diorientasikan kepada berbagai perubahan yang terjadi. Demokratisasi pembangunan merupakan salah satu isu dan tuntutan global yang tidak dapat dielakkan oleh suatu bangsa. Perubahan paradigma pembangunan ternyata memberikan nuansa kerakyatan serta memiliki nilai tambah bagi peningkatan harkat dan martabat manusia.

Pergeseran paradigma memberikan konsekuensi pada tanggung jawab yang semula diletakkan pada kekuatan pemerintah, berkembang menjadi pembangunan merupakan tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat termasuk di dalamnya dunia usaha yang secara sosial ekonomi diuntungkan. Atas dasar pertimbangan kesetaraan, pemerataan dan kepedulian maka sudah sewajarnya dunia usaha dilibatkan dalam proses pembangunan masyarakat (Korten, 1984). Partisipasi dunia usaha dalam pembangunan sosial terutama

dalam membantu mengatasi berbagai permasalahan sosial harus dipandang sebagai suatu proses pemberdayaan yang melibatkan dunia swasta dan masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Dengan demikian masing-masing unsur atau komponen mempunyai hak dan kewajiban dalam proses pembangunan.

Tanggung jawab sosial dunia usaha mempunyai arti penting dan strategis dalam menumbuhkan kesadaran untuk berbagi, membangun kerjasama atau kemitraan yang saling menguntungkan serta sebagai upaya untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan dunia usaha mempunyai peran yang lebih besar dalam pelaksanaan pembangunan. Hubungan dunia usaha dengan masyarakat menjadi lebih penting sebab akan menumbuhkan rasa kesetiakawanan sosial dari yang lebih mampu kepada yang tidak mampu, dari yang merasa lebih kepada yang kurang. Selain itu aturan agama dan moral kebanyakan masyarakat menekankan kewajiban untuk menolong orang lain yang membutuhkan, bahkan kadangkala kewajiban ini ditulis dalam bentuk hukum.

Meluasnya tuntutan publik serta menguatnya kesadaran pelaku usaha untuk menjalankan tanggung jawab sosial, pada taraf internasional antara lain tampak pada dibentuknya *World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)*. Sebanyak 180 perusahaan internasional dari 35 negara berkoalisi dalam organisasi itu. Perusahaan-perusahaan ini bergabung dengan komitmen mencapai pembangunan berkelanjutan, melalui pertumbuhan ekonomi, keseimbangan ekologi dan kemajuan sosial. Albert Fry yang pernah menjadi salah seorang manajer pada WBCSD menyatakan, pada dasarnya musuh terbesar bagi lingkungan adalah kemiskinan. Jika pada suatu kawasan yang kaya sumber daya alam, beroperasi perusahaan internasional yang meraup keuntungan besar, tetapi masyarakat di lingkungan sekitarnya didera kemiskinan, tentu terjadi ketidakadilan sosial yang perlu diluruskan (Sinar 132, 2006).

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk kemitraan dunia usaha dalam rangka penguatan ketahanan sosial masyarakat di Kota Surabaya ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemitraan dunia usaha atau pengusaha serta keputusan untuk berperilaku prososial tersebut ?

Oleh karena itu, maka penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang:

1. Bentuk kemitraan dunia usaha atau pengusaha di Kota Surabaya.
2. Upaya-upaya pemerintah dan motivasi pengusaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya.
3. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Menyajikan gambaran pelaksanaan kemitraan yang telah dilaksanakan dan bila masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya maka dapat disempurnakan kembali.
2. Memberikan masukan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan untuk meningkatkan kemitraan yang saling menguntungkan antara dunia usaha atau pengusaha dan penyandang masalah kesejahteraan sosial agar terwujud masyarakat yang berketahanan sosial.

B. Kerangka Pikir

Kecenderungan akan semakin meningkat dan kompleksnya permasalahan sosial merupakan realitas yang tidak terhindarkan. Oleh karena itu harus disadari bahwa beban tersebut tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah saja. Maka sudah sewajarnya jika tanggung jawab tersebut diletakkan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat terutama dunia usaha. Apalagi paradigma pembangunan telah bergeser yang menempatkan masyarakat sejajar dengan pemerintah dalam konteks pembangunan.

Peran serta dunia usaha dalam menunjang kegiatan sosial kemasyarakatan berdasarkan asas kesukarelaan dan dalam dunia bisnis

dikenal dengan nama *Corporate Social Responsibility* yang diterjemahkan menjadi Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha atau disingkat Tansosdus (Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, 2000). Gerakan tanggung jawab dunia usaha (*corporate responsibility*) yang mulai tumbuh di beberapa negara maju antara lain Amerika Serikat, Jepang, Korea, Hongkong, Australia dan di berbagai negara Eropa pada awal tahun 1980an menjadi awal diperkenalkan dengan apa yang disebut sebagai Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha (*Corporate Social Responsibility*).

Kelahiran tersebut sesungguhnya bukanlah sekedar bentuk kepedulian sosial bagi dunia usaha terhadap penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial di lingkungan masyarakat, tetapi lebih mengedepankan pemikiran, bahwa usaha kesejahteraan sosial menjadi bagian dari modal sosial (*social capital*) perusahaan, sehingga termasuk biaya (*costing*) yang wajib diperhitungkan sebagai bagian dari modal perusahaan. Pandangan tersebut berangkat dari suatu kenyataan bahwa investasi dan kelangsungan produksi tidak dapat dilepaskan dari kuatnya modal sosial perusahaan. Modal sosial tersebut meliputi keamanan investasi, kepercayaan, komitmen sosial dan pengelolaan jaringan. Di kalangan dunia usaha (terutama industri menengah dan besar), tanggung jawab sosial dunia usaha telah banyak memberikan keuntungan bagi lingkungan perusahaan. Keuntungan tersebut antara lain perusahaan tetap bertahan karena dampak sosial berhasil ditekan, investasi berjalan dengan aman tanpa adanya gangguan yang berarti keuntungan korporasi, usaha berjalan lancar dan keuntungan diperoleh secara maksimal, dan lain-lain. Kondisi tersebut mendorong banyak perusahaan yang menyediakan pengumpulan dana (*fund raising*) untuk menjadi modal sosial. dalam posisi yang demikian, maka resiko sosial mampu ditekan dan akhirnya ledakan sosial dapat dihindari.

Model kemitraan dunia usaha dalam penguatan ketahanan sosial masyarakat dimaksudkan sebagai bentuk kerjasama dunia usaha dalam mengatasi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial terhadap komunitas diluar lingkungan perusahaan melalui pendekatan usaha kesejahteraan sosial. kemitraan tersebut dapat dilihat dari dua sudut pandang pendekatan, yaitu (1) pendekatan

langsung (*direct approach*) yakni kerjasama antara perusahaan langsung kepada kelompok sasaran dalam komunitas masyarakat; (2) pendekatan tidak langsung (*indirect approach*) yakni kerjasama antara dunia usaha dengan komunitas masyarakat melalui pihak ketiga (lembaga sosial, orsos, LSM atau pemerintah). Selain itu kemitraan dunia usaha paling tidak harus mencakup tiga aspek penting yaitu kesejajaran (*egalitarian*), saling menguntungkan dan tanggung jawab sosial (*social responsibility*).

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dunia usaha saat ini di Indonesia umumnya diwujudkan melalui berbagai program penyediaan aksesibilitas pelayanan sosial (antara lain kesehatan, pendidikan, pinjaman dengan bunga ringan, bantuan bea siswa, rekrutmen penyandang cacat sebagai karyawan, dan lain-lain) lebih dari 40% bantuan perusahaan diilhami oleh keinginan mengembalikan sesuatu kepada komunitas yang membantunya. Kebutuhan umum mengarahkan kepada pemberian bantuan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang mereka layani (Moore, 2000). Namun belum semua perusahaan mengembangkannya sesuai dengan kondisi di lingkungannya, masih kuatnya persepsi usaha kesejahteraan sosial yang dipahami oleh dunia usaha sebagai cara karitatif. Implikasinya adalah manajemen pengelolaan yang dilakukan masih tradisional dan dalam konteks yang sangat sempit.

Pemberian bantuan oleh dunia usaha atau pengusaha kepada komunitas di lingkungannya mencakup kategori perilaku prososial yang meliputi segala bentuk tindakan yang dilakukan atau direncanakan untuk menolong orang lain, tanpa memperdulikan motif-motif si penolong (Sears, Freedman dan Peplau, 1985). Perilaku prososial berkisar dari tindakan altruisme yang tidak mementingkan diri sendiri atau tanpa pamrih sampai tindakan menolong yang sepenuhnya dimotivasi oleh kepentingan diri sendiri (Rushton, 1980). Perilaku prososial mencakup kategori yang lebih luas dari altruisme, yaitu tindakan sukarela yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun (kecuali mungkin perasaan telah melakukan kebaikan). Perilaku prososial mempunyai variasi yang sangat besar, mulai dari bentuk yang paling sederhana seperti

sekedar memberi perhatian sampai kepada yang paling tinggi, misalnya mengorbankan diri demi orang lain. Jadi konotasi perilaku prososial semata-mata melihat akibat dari tingkah laku tersebut (Pidada, 1993 dalam Hartati 1997).

Secara umum tingkah laku prososial dianggap sebagai suatu bentuk penggolongan tingkah laku yang positif yang dilawankan dengan tingkah laku sosial negatif. Tingkah laku prososial memiliki ciri khusus yang meletakkan kepentingan orang lain diatas kepentingan pribadi. Kesejahteraan dan keuntungan orang atau kelompok lain merupakan tujuannya (Pulungan, 1993). Eisenberg (dalam Pulungan, 1993) mengemukakan bahwa tingkah laku prososial meliputi 3 aspek, yaitu :

1. Tindakan yang dilakukan secara sukarela.
2. Tindakan yang ditujukan demi kepentingan orang lain atau sekelompok orang lain.
3. Tindakan itu merupakan tujuan bukan sebagai alat untuk memuaskan motif pribadi.

Karena pada umumnya bermanfaat bagi masyarakat, perilaku prososial menjadi bagian dari aturan atau norma sosial. Tiga norma yang paling penting bagi perilaku prososial adalah (1) tanggung jawab sosial yaitu norma ini menentukan bahwa seharusnya kita membantu orang lain yang bergantung pada kita bahkan kadang-kadang ditulis dalam bentuk hukum. Hukum merupakan salah satu cara untuk menekankan pada orang bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk menolong. Kenyataannya peningkatan rasa tanggung jawab pribadi, dapat meningkatkan kemungkinan seseorang memberikan bantuan; (2) prinsip timbal balik yaitu orang lebih cenderung membantu seseorang yang pernah membantu mereka; dan (3) keadilan sosial yaitu aturan tentang keadilan dan pembagian sumber daya secara adil. Salah satu prinsip keadilan adalah kesamaan. Tindakan membantu orang yang kurang beruntung dalam kehidupan sehari-hari, seperti memberikan sumbangan amal, tampaknya dimotivasi oleh keinginan untuk menciptakan situasi yang lebih adil.

Fokus garapan tanggung jawab sosial dunia usaha atau pengusaha adalah kelompok yang rentan terhadap permasalahan kesejahteraan sosial karena kondisi ini menjadi sangat

rentan terhadap ketahanan sosial masyarakat. Oleh karena itu ketahanan sosial suatu komunitas sangat ditentukan oleh sejauhmana tingkat capaian kesejahteraan sosial yang mereka dapatkan. Ketahanan sosial masyarakat adalah suatu kemampuan dari komunitas dalam mengatasi berbagai resiko perubahan sosial, ekonomi, politik yang mengelilinginya. Suatu komunitas dipandang memiliki ketahanan sosial bila (1) mampu memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan, miskin dan penyandang masalah sosial; (2) adanya partisipasi masyarakat dalam organisasi sosial; (3) adanya pengendalian terhadap tindak kekerasan/konflik sosial; dan (4) Adanya kearifan dalam memelihara sumber daya alam dan sosial (PusbangTansosmas, 2002).

Dalam sudut pandang ini ketahanan sosial masyarakat dipandang sebagai sebuah *outcome* dari lembaga atau komunitas dimana modal sosial sebagai *software* yang bekerja. Jadi penguatan ketahanan sosial masyarakat harus dilihat dari sejauh mana keberfungsian modal sosial dalam memberikan energi sosial demi terwujudnya daya tahan sosial masyarakat itu sendiri (Nuryana dalam Pusbang Tansosmas, 2002).

Berbagai pengertian di atas jika dikaitkan dengan tanggung jawab sosial maka kesetiakawanan sosial merupakan pengejawantahan dari tanggung jawab sosial individu atau kelompok terhadap lingkungan sosial mereka. Tanggung jawab sosial dengan sendirinya akan memunculkan adanya rasa kesetiakawanan atau solidaritas, kepedulian atau kepekaan sosial. Jika sikap-sikap seperti ini tumbuh dan berkembang dengan baik dalam masyarakat akan sangat kondusif bagi pembangunan kesejahteraan sosial yang dapat terlihat dari usaha kesejahteraan sosial yang diupayakan.

C. Metodologi Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang dimaksudkan untuk melihat, mendengar, sekaligus menggali berbagai informasi tentang bentuk-bentuk kerjasama atau kemitraan dunia usaha terhadap masyarakat di luar perusahaan. Teknik pengumpulan data diperoleh dari studi kepustakaan, wawancara mendalam, observasi lapangan dan diskusi kelompok

terfokus. Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis sehingga diperoleh suatu data yang akurat serta bentuk atau hasil berupa narasi, selain mendeskripsikan tentang berbagai bentuk atau model kemitraan dunia usaha, faktor-faktor serta rumusan model kemitraan dunia usaha dalam penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Berdasarkan kebutuhan substansi penelitian maka informan atau responden yang akan dijadikan sumber informasi terdiri dari tiga unsur yaitu: (1) pelaku dunia usaha: pihak manajemen perusahaan atau pengusaha; (2) masyarakat mitra: tokoh formal/informal, orsos, LSM; dan (3) pemerintah: Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Perindustrian.

Penentuan lokasi mempertimbangkan wilayah yang berbasis industri. Perusahaan atau industri yang dimaksudkan dalam penelitian ini harus dapat memberikan gambaran yang dapat merepresentasikan dunia usaha secara umum baik dilihat dari skala usahanya (perusahaan besar, sedang dan kecil) maupun sifat kepemilikannya (PMA, PMDN atau

tumbuhan industri. Wajah kota dengan penduduk yang lebih dari dua juta jiwa ini, sekilas hampir tidak jauh berbeda tampilannya dengan Jakarta. Dari 32 ribu hektar luas wilayahnya, 81 persen wilayah diperuntukkan bagi pembangunan perumahan, perkantoran dan industri. Sehingga dapat dibayangkan betapa pesatnya pembangunan (fisik) kota dalam hal ini serta dapat dijadikan sebagai tolak ukur bahwa pemerintah kota Surabaya sangat bersungguh-sungguh dalam menggarap wilayah ini.

Status Surabaya sebagai kota industri dan perdagangan memang cukup pantas jika dilihat dari prosentase sektor ekonomi setiap tahunnya. Sektor industri pengolahan dan perdagangan merupakan kontribusi yang utama dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2003 saja sektor ini menyumbang sebesar 35 persen. Surabaya semakin berkembang menjadi kota industri dan perdagangan di Jawa Timur mensejajarkan dengan Jakarta. Sebagai gambaran dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1
Data Klasifikasi Industri Kota Surabaya Tahun 2002

No.	Klasifikasi Industri	Th 2001/unit	Th 2002/unit
1.	Industri kecil (bila tenaga kerja berjumlah 1-4 orang)	10.342	11.522
2.	Industri menengah (bila tenaga kerja berjumlah 2-99 orang)	654	746
3.	Industri besar (bila tenaga kerja berjumlah lebih dari 100 orang)	146	147
Jumlah		11.142	12.415

Sumber : Disperindag Kota Surabaya tahun 2003

gabungan keduanya). Penelitian ini dilakukan di kawasan industri dan beberapa perusahaan yang telah melaksanakan kemitraan di kota Surabaya, Jawa Timur.

II. HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Surabaya

Surabaya dikenal sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur dan sebagai Kota Pahlawan. Sebagai kota terbesar kedua setelah Jakarta, Surabaya semakin memantapkan ciri atau karakternya sebagai kota metropolitan yang ditandai dengan semakin semaraknya pembangunan dan semakin suburnya per-

Gambaran ini semakin menunjukkan bahwa sektor industri dan perdagangan tampaknya akan menjadi primadona kota ini didalam menghimpun pemasukan devisa Kota Surabaya.

Pada sisi lain wajah Kota Surabaya menyimpan berbagai permasalahan sosial yang terkait dengan pembangunan kesejahteraan sosial dengan masih relatif besarnya angka penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Hal ini dapat dipahami bahwa sirkulasi penduduk yang cenderung dinamis dan meningkat datang ke kota ini, sehingga permasalahan sosial berkembang seiring dengan laju pertumbuhan penduduk (urbanisasi) di kota ini.

B. Pandangan terhadap PMKS

Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terdapat di Kota Surabaya dapat dilihat dari tabel berikut :

Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taskin).

Pola kerjasama antara pemerintah, dunia usaha dan kalangan LSM selama ini sudah

Tabel 2
Data PMKS Kota Surabaya tahun 2002

No.	Jenis PMKS	Jumlah
1.	Anak Terlantar	193
2.	Anak Nakal	67
3.	Tuna Susila	1.510
4.	Pengemis	32
5.	Gelandangan	32
6.	Korban Penyalahgunaan Narkotika	18
7.	Anak, Wanita dan Lanjut Usia yang menjadi korban tindak kekerasan dan perlakuan salah	-
8.	Penyandang Cacat, terdiri dari :	
	a. Cacat Tubuh	282
	b. Cacat Netra	122
	c. Cacat Rungu Wicara	174
	d. Cacat Mental	307
	Jumlah	885
9.	Penyandang Cacat Bekas Penderita Penyakit Kronis	220
10.	Bekas Narapidana	1.153
11.	Lanjut Usia Terlantar	997
12.	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	965
13.	Keluarga Fakir Miskin	7.601
14.	Keluarga Berumah Tak Layak Huni	1.771
15.	Perintis Kemerdekaan dan Keluarga Pahlawan Nasional	28
16.	Keluarga Bermasalah Sosial	20
17.	Keluarga Bencana Alam dan Musibah lainnya	31
18.	Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana	707
19.	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-
20.	Anak Balita Terlantar	153
21.	Anak Jalanan	215
22.	Pengungsi	107

Sumber : Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur tahun 2003

Dari 22 jenis PMKS di atas, angka tertinggi terdapat di penyandang fakir miskin sebanyak 7.601 jiwa maka wajar jika kebijakan untuk menjadikan masalah pengentasan kemiskinan menjadi skala prioritas Kota Surabaya. Namun demikian bukan berarti masalah-masalah lainnya tidak mendapat penanganan, demikian dikemukakan pihak Dinas Sosial Kota Surabaya. Dalam konteks ini sedang berupaya menerapkan konsep penanganan terpadu yang melibatkan berbagai instansi lintas sektor, kalangan dunia usaha dan LSM dengan

berjalan dengan baik namun perlu terus ditingkatkan terutama bagi kalangan dunia usaha. Karena belum seluruh pengusaha atau dunia usaha yang memiliki cara pandang dan komitmen yang sama terhadap PMKS dan pembangunan kesejahteraan sosial pandangan ini juga didukung oleh sebagian besar pengusaha yang mengemukakan bahwa walau sebagian besar para pengusaha memahami kenyataan tetapi realisasi dari komitmennya kurang mendukung. Komitmen politik pemerintah daerah dalam hal ini sangat

dibutuhkan, sehingga para pengusaha yang kurang memiliki kepedulian terhadap berbagai hal yang terkait dengan masyarakat disekitarnya menaruh perhatian.

Disamping itu perlu dirancang pola komunikasi yang produktif antara pemerintah daerah dengan kalangan dunia usaha serta LSM dalam menumbuhkembangkan kesadaran dan tanggung jawabnya. Walaupun selama ini dipandang sudah berjalan tetapi secara berkelanjutan program ini perlu dilestarikan secara lebih kondusif dan konstruktif tanpa dipengaruhi oleh momen-momen politik seperti pada saat pemilihan gubernur atau walikota.

Bagi pemerintah maupun masyarakat Surabaya, keberadaan LSM dipandang sebagai suatu hal yang dapat memberikan dukungan terhadap berbagai permasalahan sosial selama ini. Bahkan dengan berbagai pengalaman dan penguasaan konsep-konsep pemberdayaan dan pendampingannya kalangan ini banyak memberikan kontribusi terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam hal penanganan masalah kesejahteraan sosial.

C. Pandangan terhadap Kemitraan

Secara umum dunia usaha memiliki perhatian dan kepedulian terhadap berbagai permasalahan kesejahteraan sosial terutama dunia usaha kalangan menengah ke bawah. Kalangan dunia usaha menengah ke atas pada umumnya dipandang kurang memiliki tanggung jawab atau kepedulian terhadap permasalahan ini. Walaupun mereka memiliki kepedulian tetapi masih bersifat sporadis, temporer, seremonial serta karitatif. Disamping itu mereka masih memandang sebagai sarana promosi belaka daripada sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab sosialnya.

Belum adanya pola atau model kerjasama atau kemitraan yang secara terpadu dan sistematis dalam membantu mengatasi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial menjadi alasan bagi upaya membangun kemitraan dunia usaha. Walaupun ada beberapa pengusaha atau perusahaan yang sudah melakukan, tetapi belum mencerminkan adanya sebuah model kemitraan yang secara umum dapat merepresentasikan model kemitraan dunia usaha khas Surabaya.

Belum adanya payung politik atau kemauan politik (*political will*) dari pemerintah setempat juga merupakan faktor penting di dalam membangun kemitraan dunia usaha. Payung politik sebagai wahana yang dapat dijadikan sebagai payung komitmen dunia usaha terhadap peran serta terhadap penanganan permasalahan kesejahteraan sosial yang khususnya terdapat di sekitar wilayah Surabaya. Selama ini sebagian pengusaha atau dunia usaha merasa dipaksa untuk melakukan atau memberikan bantuan karena cara-cara yang dipergunakan masih menggunakan cara konvensional pemaksaan. Jadi bantuan atau kerjasama yang diberikan bukan atas kesadaran tetapi lebih dikarenakan sebagai bentuk pemaksaan.

D. Pelaksanaan Kemitraan

Pelaksanaan kemitraan dunia usaha dengan masyarakat PMKS pada umumnya diwujudkan melalui berbagai program aksesibilitas pelayanan sosial mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, permodalan, manajemen dan ketrampilan, rekrutmen penyandang cacat sebagai tenaga kerja, sebagai bapak asuh memberikan santunan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu dan kerjasama dalam hal memasarkan produk dan sebagainya. Perusahaan besar maupun kecil yang melaksanakan kemitraan karena telah merasakan manfaatnya serta telah tumbuh kesadaran dari mereka untuk melakukan tanggung jawab sosialnya. Menurut data Dinas Sosial dan Dinas Koperasi Kota Surabaya tahun 2003, perusahaan-perusahaan yang telah melakukan kemitraan antara lain : Kedaung Subur, UBM, Nasprindo, Maspion, Pokpaint, BUMN (Bank Mandiri, Pertamina, Rajawali Nusantara Indonesia, Garuda Indonesia, Jasa Raharja, PT. Dok dan Perkapalan, PT Iglass, Perum Sarana Pengembangan Usaha, PT. Angkasa Pura I, PT, Pelindo III dan Perum Peruri), serta perusahaan skala menengah dan kecil lainnya.

Para pengusaha tersebut merasa telah mendapatkan keuntungan dengan tetap bertahannya perusahaan dalam melaksanakan usahanya karena didukung oleh lingkungan masyarakat sekitarnya. Disamping itu ada keyakinan bahwa di wilayah yang memberikan

dukungan keamanan dan kenyamanan berusaha secara ekonomis dapat mendatangkan keuntungan bagi pengusaha. Keyakinan tersebut ternyata banyak mendorong pengusaha melakukan kerjasama kemitraan dengan masyarakat yang kurang beruntung secara sosial ekonomi.

Disamping itu dukungan pemerintah daerah baik propinsi maupun Kota Surabaya yang kondusif dalam menumbuhkembangkan kemitraan ini sebagai bentuk alternatif pembangunan masyarakat yang lebih menekankan pada peran serta masyarakat khususnya dunia usaha. Hal ini terlihat dari adanya program skala prioritas dalam penanganan masalah kemiskinan. Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taskin) mendapat dukungan yang penuh dari dunia usaha dan LSM.

E. Model Kemitraan

Secara garis besar model kemitraan di Kota Surabaya menggunakan model kemitraan langsung dan tidak langsung. Model kemitraan langsung melalui kerjasama antar perusahaan langsung kepada sasaran atau masyarakat sekitarnya seperti perusahaan menjual produknya dengan harga yang lebih murah, menyediakan lahan bagi pedagang kaki lima dan kesempatan bagi penyandang cacat untuk bekerja di perusahaannya. Sedangkan kemitraan tidak langsung yaitu kerjasama antara pihak perusahaan dengan masyarakat melalui pihak ketiga seperti pemerintah, LSM, orsos atau lembaga pelayanan sosial lainnya. Model kemitraan seperti ini lebih banyak menekankan pada peran pihak ketiga dalam mengarahkan pelaksanaan kemitraan. Keberlangsungan kemitraan ini juga tergantung pada kesiapan pihak ketiga mempersiapkan pelaksanaannya serta sejauhmana semua pihak dapat diuntungkan.

Adapun wujud dari model kemitraan dapat dilihat seperti :

1. Pengusaha retail membantu pengusaha kecil dalam memasarkan produknya di supermarket atau sentra-sentra kulakan.
2. Perusahaan menggandeng LSM untuk membina masyarakat binaannya misalnya pembentukan koperasi tukang becak, pemulung, anak jalanan. Perusahaan memberikan bantuan modal serta keterampilan.

3. LSM atau orsos seperti Yayasan Karya Mandiri melakukan pendampingan bagi penyandang cacat tuna rungu untuk menjadi tenaga kerja di pabrik-pabrik.
4. BUMN menjalin kemitraan dengan pengusaha kecil memberikan bantuan modal dengan bunga ringan.
5. Perusahaan memberikan bantuan pelayanan kesehatan (penyediaan pelayanan kesehatan dengan biaya murah), pendidikan (bea siswa bagi warga masyarakat sekitar), bantuan sosial (biasanya dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri) kepada warga masyarakat sekitar, jaminan sosial bagi tenaga kerja, rekrutmen bagi penyandang cacat serta konsorsium sosial (memberikan pinjaman modal perusahaan untuk usaha peternakan di beberapa desa dengan cara bagi hasil) dan perbaikan lingkungan yang kumuh.

Selain itu juga terdapat model kemitraan tidak langsung yang melibatkan kalangan LSM, orsos serta lembaga pelayanan sosial lainnya. Mereka berpendapat bahwa :

1. LSM/Yayasan Sosial/TKSM telah banyak melakukan berbagai peran usaha kesejahteraan sosial berbasis industrial. LSM tersebut antara lain Yayasan Pondok Kasih Surabaya, Pondok Pesantren Surlaya Surabaya, BK3S Jawa Timur, Yayasan Abdi Asih dan Karya Mandiri Surabaya.
2. Bidang yang dilakukan oleh LSM/Yayasan sosial/TKSM dititik beratkan pada peran pendampingan, advokasi, kampanye sosial dan pemberian informasi.
3. Masalah yang ditangani antara lain HIV/AIDS di lingkungan industri, rekrutmen penyandang masalah sosial, khususnya cacat, narkoba/napza di lingkungan masyarakat industri dan pekerja seks komersial yang dilakukan oleh para buruh di kawasan industri.

F. Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Faktor Pendukung
 - a. Adanya komitmen dan kepedulian sebagian besar pengusaha terhadap penanganan masalah kesejahteraan sosial di lingkungan usahanya.
 - b. Peran aktif berbagai pihak seperti LSM, orsos dan lembaga sosial

- lainnya dalam membantu mewujudkan kemitraan.
- c. Dukungan penuh pemerintah daerah dalam melakukan kemitraan berupa tersedianya sumber pembiayaan maupun program kegiatan.
 - d. Semangat dan kebersamaan berbagai pihak menjadikan wilayah Kota Surabaya sebagai kawasan yang peduli terhadap permasalahan kesejahteraan sosial.
2. Faktor Penghambat
- a. Lesunya kondisi ekonomi sehingga perusahaan mengurangi produksinya atau bahkan pengurangan jumlah karyawan.
 - b. Kurang tersedianya media yang dapat mendata jumlah perusahaan yang telah melakukan program kemitraan.
 - c. Ada kesan bahwa kinerja birokrasi terlalu lamban dan kurang efektif sehingga banyak dari kalangan pengusaha merasa enggan berhubungan dengan pemerintah.

III. ANALISIS BENTUK KEMITRAAN DI KOTA SURABAYA

A. Keterkaitan dengan Penguatan Ketahanan Sosial Masyarakat

Berbagai temuan di lapangan menegaskan bahwa kemitraan dunia usaha dalam pembangunan masyarakat terutama dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial menjadi sangat penting, paling tidak disebabkan oleh tiga hal mendasar, yaitu :

1. Semakin terbatasnya kemampuan pemerintah baik secara finansial maupun sumberdaya dalam menangani pembangunan masyarakat terutama dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial.
2. Adanya pergeseran paradigma pembangunan yang lebih memberikan peluang bagi tumbuhnya peran serta masyarakat (dunia usaha), LSM pada satu sisi, pada sisi lain peran dan dominasi pemerintah semakin dikurangi.

3. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, konsekuensinya adalah setiap daerah harus mampu mencari terobosan-terobosan yang dapat membantu proses pembangunan masyarakat di wilayahnya pada sisi lain akan semakin memperkecil ketergantungan kepada pemerintah pusat.

Kondisi masyarakat yang rentan terhadap permasalahan kesejahteraan sosial dipandang dapat berpengaruh terhadap kondisi yang menunjukkan pada ketahanan sosial masyarakat. Jika ketahanan sosial masyarakat terganggu maka dimungkinkan masyarakat tersebut mengalami disintegrasi sosial yang dapat merugikan semua pihak termasuk pemerintah. Masyarakat yang mengalami disintegrasi sosial adalah cerminan dari masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori masyarakat yang berkesejahteraan sosial.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa kemitraan dunia usaha dapat diartikan sebagai modal sosial yang dapat dikembangkan menjadi potensi yang dapat digunakan dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Dengan adanya kemitraan dunia usaha yang berorientasi kepada penanganan permasalahan kesejahteraan sosial maka kemitraan itu sendiri dapat berimplikasi kepada :

1. Kebersamaan dan kepedulian para pengusaha dalam permasalahan kesejahteraan sosial. Hal ini mencegah kecemburuan, timbulnya konflik atau terjadinya gangguan dari masyarakat rentan secara sosial ekonomi.
2. Menimbulkan keamanan dan kenyamanan berusaha dari kalangan dunia usaha, karena dengan bermitra dengan komunitas setempat ini berarti para pengusaha juga telah melakukan investasi sosial yang juga menguntungkan secara ekonomi.
3. Dengan adanya kemitraan dapat membantu menangani permasalahan sosial yang dialami oleh komunitas penyandang permasalahan kesejahteraan sosial.
4. Kemitraan juga dapat menimbulkan kehidupan yang harmonis antara dunia usaha, pemerintah, LSM atau orsos serta masyarakat pada umumnya.

Dampak yang ditimbulkan dari kemitraan dunia usaha dapat berpengaruh terhadap penguatan ketahanan sosial masyarakat seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa kemitraan dunia usaha dapat diartikan sebagai modal sosial. secara sederhana modal sosial mengacu kepada (a) nilai, (b) kepercayaan, (c) jejaring dan (d) komitmen. Sementara kemitraan dalam konteks ini dapat mengacu kepada penanaman nilai kemanusiaan, kesetiakawanan sosial, kepedulian sosial serta tanggung jawab sosial dunia usaha terhadap keadaan masyarakat disekitarnya. Kemitraan juga dipandang sebagai menanamkan kepercayaan dari dunia usaha atau sebaliknya pada masyarakat serta pemerintah bahwa dunia usaha mempunyai tanggung jawab terhadap berbagai permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat di sekitarnya.

Selanjutnya kemitraan juga mengandung pengertian membangun jaringan yang saling menguntungkan antara kalangan dunia usaha dengan masyarakat mitra sasaran. Disamping itu kemitraan juga diartikan sebagai sebuah upaya dari pengejawantahan dari adanya komitmen dunia usaha terhadap penanganan PMKS yang ada disekitarnya. Dengan demikian penguatan ketahanan sosial masyarakat dapat dilakukan melalui penguatan dan pemberdayaan modal sosial yang meliputi, kepercayaan, jaringan dan komitmen.

B. Keterkaitan dengan Perilaku Prososial Kalangan Dunia Usaha atau Pengusaha

Perilaku prososial merupakan bagian kehidupan sehari-hari, suatu kenyataan yang dibuktikan melalui berbagai penelitian psikologis. Tampaknya kita memang mudah menolong atau memberikan tanggapan terhadap permintaan tolong. Namun demikian, beberapa penelitian psikologi sosial memperlihatkan bahwa ada beberapa faktor penentu perilaku prososial yang spesifik yang dipengaruhi oleh karakteristik situasi, karakteristik penolong dan karakteristik orang yang membutuhkan pertolongan.

Berbagai karakteristik tersebut terkait dengan situasi saat melakukan kemitraan dimana masih terdapat masyarakat yang kurang beruntung di lingkungan sekitar perusahaan. Karakteristik penolong terkait

dengan kepribadian pengusaha yang bersangkutan, apakah secara sukarela melakukan kemitraan ataukah karena keterpaksaan, apakah menguntungkan atau dirugikan. Sedangkan karakteristik orang yang ditolong terkait dengan apakah benar-benar membutuhkan pertolongan. Selain itu kehadiran orang lain juga menentukan, artinya pengusaha melihat apakah perusahaan lain melakukan kemitraan juga, apabila dilihatnya menguntungkan maka dibuat juga program kemitraan serupa.

Perilaku prososial meliputi segala bentuk tindakan yang dilakukan atau direncanakan untuk menolong orang lain. Ada tiga norma yang paling penting bagi perilaku prososial, yaitu tanggung jawab sosial, timbal balik dan keadilan sosial. Tanggung jawab sosial yang dilakukan dunia usaha merupakan salah satu bentuk perilaku prososial untuk menolong sesama yang kurang beruntung terutama mereka yang berada di lingkungan sekitar perusahaan. Norma timbal balik terlihat dari keuntungan yang didapat kedua belah pihak, dimana pengusaha merasa aman dan nyaman berusaha tanpa adanya gangguan, usaha berjalan lancar dan diperolehnya keuntungan. Sedangkan bagi masyarakat kurang beruntung di lingkungan perusahaan tersebut dibantu mengurangi permasalahan yang mereka hadapi, hal ini selanjutnya diharapkan dapat membantu pembangunan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Tingkah laku para pengusaha yang secara sukarela bersedia mensejahterakan orang lain atau sekelompok orang yang kurang beruntung dan kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam lingkungan masyarakat sekitar telah memenuhi ketiga aspek tingkah laku prososial. Perilaku para pengusaha yang melaksanakan kemitraan memiliki akibat positif yang bermanfaat bagi kesejahteraan fisik dan psikis orang lain. Perilaku menolong merupakan perilaku yang lebih memberikan keuntungan pada orang lain dibandingkan untuk dirinya sendiri. Secara kultural, perilaku prososial pengusaha dapat diartikan sebagai tingkah laku berbagi, membantu seseorang atau sekelompok orang yang membutuhkan, bekerjasama dengan orang lain dan mengungkapkan simpati.

C. Pendefinisian Peran

Membahas tentang kemitraan maka tentu saja tidak terlepas dari pembahasan aktor pelaku kemitraan yang berperan didalamnya. Oleh karena itu pembahasan tentang aktor juga tidak terlepas dari pendefinisian peran yang dilakukan oleh aktor dalam melakukan kemitraan. Dalam konteks kemitraan paling tidak ada empat kategori aktor yang dapat didefinisikan yaitu : (1) dunia usaha/pengusaha, (2) pemerintah atau instansi terkait, (3) LSM atau orsos dan (4) masyarakat mitra sasaran.

Pada umumnya dunia usaha telah memahami tanggung jawab sosialnya meskipun dalam lingkup dan tataran yang relatif sempit dan sederhana. Tanggung jawab sosial diwujudkan dalam berbagai bentuk program atau kegiatan yang dilakukan secara langsung ataupun melalui pihak ketiga. Komitmen dunia usaha oleh sebagian pengusaha dipandang sebagai investasi sosial dalam masyarakat yang diasumsikan dapat mendatangkan keuntungan bagi usahanya dalam pengertian yang luas. Namun demikian peluang yang telah diciptakan tersebut belum tentu dapat dimanfaatkan oleh kalangan masyarakat karena disamping aksesibilitas masyarakat yang terbatas juga disebabkan kekurangsiapan masyarakat dalam bermitra dengan kalangan dunia usaha.

Permasalahan ini yang seringkali menjadi kendala bagi terwujudnya kemitraan ini diharapkan dapat membantu menangani permasalahan kesejahteraan sosial. Tetapi yang terpenting dalam hal ini adalah adanya kesadaran dari dunia usaha untuk membuka diri dalam melakukan kerjasama dengan masyarakat, sehingga keberadaannya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Pada sisi lain kesiapan masyarakat mitra sasaran juga harus diperhatikan sebagai upaya untuk mengkondisikan masyarakat mitra sasaran kepada kondisi yang diinginkan kedua pihak dengan prinsip kemitraan yang saling menguntungkan.

Oleh karena itu peran pemerintah dan LSM atau orsos dalam hal ini sangatlah penting untuk memberikan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat mitra sasaran agar lebih siap bermitra dengan dunia usaha. LSM, orsos dan lembaga sosial memiliki tanggung jawab sosial agar masyarakat lebih berdaya, lebih memiliki kemampuan dan ketrampilan yang

sesuai dengan kualifikasi atau kriteria yang diinginkan dalam kemitraan. Bimbingan sosial dan pendampingan sosial merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh mereka agar masyarakat lebih mampu dan lebih siap dimitrakan dengan kalangan dunia usaha. Dengan kondisi seperti itu maka keberadaan mitra sasaran tidak lagi dipandang sebagai beban bagi pengusaha tetapi benar-benar menjadi mitra yang saling menguntungkan.

Mengkondisikan situasi yang ideal seperti tersebut diatas memang tidaklah mudah tetapi memerlukan suatu pendekatan yang komprehensif dari berbagai pihak yang terkait dengan permasalahan ini. Peran pemerintah dalam hal ini bisa sangat menentukan jika pemerintah (daerah) dapat mengeluarkan suatu kebijakan yang bersifat mengikat kepada semua pihak termasuk dunia usaha dalam mewujudkan tanggung jawab bersama terhadap pembangunan masyarakat terutama dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial. Kemauan politik pemerintah daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan komitmen pemerintah daerah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial. Jadi pemerintah daerah dalam hal ini dapat berperan sebagai regulator, motivator dan fasilitator untuk menumbuh-kembangkan semangat kemitraan yang bernuansa pada permasalahan kesejahteraan sosial.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam kenyataannya permasalahan kesejahteraan sosial cenderung meningkat dan kompleks yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PMKS). Disadari pula bahwa pola penanganan permasalahan kesejahteraan sosial selama ini masih bertumpu pada kemampuan pemerintah dan seakan-akan permasalahan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Padahal dengan adanya pergeseran paradigma pembangunan dan semakin terbatasnya kemampuan pemerintah, tidak realistis jika permasalahan ini hanya dibebankan kepada pemerintah.

Atas dasar berbagai pertimbangan tersebut maka keterlibatan (peran serta) dan kerjasama berbagai pihak antara perusahaan,

pemerintah dan komunitas yang mencakup masyarakat dan organisasi nonpemerintah terutama dunia usaha dipandang perlu dan penting didalam membantu memberikan jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi. Dunia usaha telah memahami tanggung jawab sosialnya walau dalam konsep yang masih sangat sempit dan sederhana. Komitmen dunia usaha terhadap pentingnya komponen tanggung jawab sosial sebagai bagian dari modal perusahaan. Dunia usaha juga sadar bahwa tanggung jawab sosial penting untuk mempertahankan investasinya. Kontribusi dunia usaha dalam kerangka ini dipahami sebagai kemitraan yang berorientasi pada penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dengan tertanganinya PMKS secara baik diasumsikan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial serta diharapkan dapat meningkatkan ketahanan sosial masyarakat.

Bentuk kemitraan yang dikembangkan di Kota Surabaya selain sudah mencerminkan adanya kerjasama antara dunia usaha, LSM dan pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial seperti masalah kemiskinan. Program ini juga mencerminkan keterpaduan program serta perhatian yang besar dari pemerintah daerah terhadap penanganan permasalahan ini dengan dikeluarkannya SK Gubernur tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taskin). Selain itu telah disepakati bersama untuk membentuk Forum Jaringan "Corporate Social Responsibility" yang berbadan hukum dalam bentuk yayasan sosial. Oleh karena itu dalam konteks penanganan masalah kemiskinan,

daerah yang lain dapat mengadopsi model seperti ini.

B. Rekomendasi

Dengan berbagai pertimbangan yang bersifat akademis maupun empiris maka penelitian ini dapat merekomendasikan beberapa hal penting sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini hendaknya ditindaklanjuti dengan *review* yang lebih mendalam dan seksama guna lebih menyempurnakan hasil-hasil temuan di lapangan terutama bentuk kemitraan dunia usaha dalam penguatan ketahanan sosial masyarakat.
2. Pelaksanaan program tanggung jawab sosial dunia usaha perlu ditindaklanjuti dengan memperluas gerakan melalui sensitivitas daerah dalam mencari kesempatan saat penyelenggaraan pertemuan yang dilakukan oleh kalangan usahawan seperti ASPRINDO, KADIN dan lain-lain.
3. Pengendalian program perlu dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi tentang seberapa jauhkah dunia usaha berhasil mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya pasca pertemuan.
4. Untuk menjamin kelangsungan program, perlu dikembangkan pola jaringan lintas dunia usaha. Jaringan ini sangat perlu untuk melakukan negosiasi, kampanye sosial, advokasi sosial, memberikan informasi, partisipasi, rujukan dan lain-lain dalam rangka penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial berbasis industrial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 1994. *Psikologi Pekerjaan Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Rajawali Press.
- Departemen Sosial. 1994. *Panduan Gerakan Nasional Kesetiakawanan Sosial*. Jakarta.
- Hartati, Netty. 1997. *Perilaku dan Motif Prosocial Anak Berbakat Intelektual Umum di Kelas Reguler*. Tesis. Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Korten, David. 1984. *People Centered Development; Contribution Toward Theory and Frame Work*. Kuman Press.
- Moeljarto, T. 1984. *Politik Pembangunan Sebuah Analisis, Konsep, Arah dan Strategi*. PT. Tiara Wacana. Yogyakarta.
- Moore, H. Frazier. 2000. *Hubungan Masyarakat, Prinsip, Kasus dan Masalah*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Pulungan, Wazar. 1993. *Kecenderungan Tingkah Laku Prosocial Remaja dihubungkan dengan Golongan Pekerjaan Ayah dan dan Pola Asuh dari Keluarga, Studi Perbandingan terhadap Remaja dari Keluarga ABRI, PNS, guru dan pedagang di 10 SMAN Jakarta*. Disertasi. Fakultas Psikologi Universitas Indonesia

Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat. 2005. *Menuju Masyarakat Berketahanan Sosial*. Executive Summary. Jakarta.

Sinar, Majalah Penyuluhan Sosial. *Arti Penting CSR, lebih dari sekedar promosi perusahaan*. Nomor 132/2006.

Sears, David O; Freedman, Jonathan L; Peplau, L. Anne. 1985. *Psikologi Sosial*. Edisi kelima Jilid 2. Erlangga. Jakarta.

BIODATA PENULIS :

Irmayani, Peneliti pada Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI.